

# JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume II, Nomor 01, Mei - Oktober, 2017

---

**Analisis Indeks Pembangunan Manusia:  
Investasi Pendidikan sebagai Peningkatan Daya Saing Bangsa**

Penulis : Riphon Delzy Perkasa

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume II, Nomor 01, Mei – Oktober 2017

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

# Analisis Indeks Pembangunan Manusia: Investasi Pendidikan sebagai Peningkatan Daya Saing Bangsa

**Ripho Delzy Perkasa**

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email: [rdp\\_mpd@yahoo.co.id](mailto:rdp_mpd@yahoo.co.id)

## **ABSTRACT**

*Writing this article aims to illustrate: 1). Description of Human Development Index of Indonesia. 2) The steps taken by the Indonesian government on education in improving the nation's competitiveness. This article uses literature study approach. Education is one component in the measurement of human development index. So basically the high level of human development index should describe the ideal condition, but in fact the increasing index of human development in Indonesia does not necessarily mean that with a good level of education will give birth to a prosperous individual or society but there is still considerable inequality from various layers community.*

**Keywords: Human Development Index, Educational Investment, Nation Competitiveness**

## **ABSTRAK**

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan: 1). Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 2) Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia pada pendidikan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks pembangunan manusia. Jadi pada dasarnya tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia seharusnya menggambarkan kondisi yang ideal, namun kenyataannya meningkatnya indeks pembangunan manusia di Indonesia tidak serta merta bahwa dengan tingkat pendidikan yang baik akan melahirkan individu atau masyarakat yang sejahtera akan tetapi masih terdapat ketimpangan yang cukup mencolok dari berbagai lapisan masyarakat.*

**Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Investasi Pendidikan, Daya Saing Bangsa**

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya dalam pembangunan indeks manusia ada dua komponen atau investasi yang saling terkait yang meliputi investasi pada kesehatan dan investasi di bidang pendidikan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dengan pembangunan ekonomi, satu sisi modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian investasi yang dicurahkan untuk pendidikan karena kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir di sekolah dalam pembelajaran formal seorang individu. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidikan. Disisi lain modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan karena pada dasarnya banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari disekolah termasuk kesehatan pribadi dan sanitasi disamping melek huruf dan angka

juga sangat dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas dan pelayan kesehatan. Pada akhirnya perbaikan atas efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan yang dapat meningkatkan harapan hidup seseorang.

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang termasuk Indonesia untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan.

Saat sekarang Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global yang menuntut peningkatan kualitas dan produktifitas manusia terdidik. Berbagai kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dilahirkan antara lain melalui sebuah lompatan besar dalam legislasi anggaran pendidikan hingga mencapai sedikitnya 20% dari APBN. Namun kenyataannya besarnya anggaran pendidikan bukanlah merupakan sebuah jaminan untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Pemerintah Indonesia masih harus bekerja keras mewujudkan efisiensi pengelolaan, pengalokasian dan pendayagunaan anggaran pendidikan agar secara efektif dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Daya saing hanya dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa yang mandiri yaitu bangsa yang mampu melaksanakan kebijakan dan program pembangunan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan kemandirisan tersebut dapat terwujud apabila Indonesia mampu melepaskan diri dari ketergantungan dari negara lain.

Pendidikan Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak kalangan khususnya bagi pemerhati dunia pendidikan. Pembangunan pendidikan di Indonesia cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik dari pada pembangunan non fisik (pendidikan) itu sendiri. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) mudah ditargetkan dari segi waktu dan tampak nyata hasilnya sehingga mudah melakukan pengukurannya. Sebaliknya pembangunan dibidang yang menyentuh kemampuan manusia dalam menapaki kehidupannya yang juga sebagai modal membangun negara sulit ditargetkan dalam waktu yang singkat. Disamping itu juga, sulit diukur karena hasil pendidikan adalah kemampuan manusia yang dididik dimana kemampuan seseorang itu berkembang terus seiring dengan perjalanan hidupnya. Semakin banyak tantangan dan lika-liku perjalanan hidup seseorang akan menentukan juga pada kemampuan individu tersebut. Dengan demikian sering orang mengatakan bahwa kesuksesan seorang dipengaruhi oleh pengalamannya dalam mengarungi kehidupannya, bukannya dari hasil pendidikan yang diperolehnya di bangku pendidikannya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 68,90.

Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2014. IPM Indonesia pada tahun 2015 tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun 2014. Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,78 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan pada 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 10,15 juta rupiah pada tahun 2015, meningkat Rp 247 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut temuan UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia

dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Badan Pusat Statistik melaporkan hari ini, Senin, 17 April, 2017, komponen pembentuk IPM secara keseluruhan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,9 tahun atau meningkat 0,12 tahun dibandingkan 2015. Anak-anak usia 7 tahun juga memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau meningkat 0,11 tahun dibandingkan 2015. Selain itu, pengeluaran per kapita masyarakat juga telah mencapai Rp10,42 juta pada 2016. Nilai itu meningkat Rp 270 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM Indonesia terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Dilihat per provinsi, tercatat ada tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan IPM paling cepat yaitu Papua yang naik 1,40 persen, Sumatra Selatan naik 1,16 persen, dan Jawa Timur tumbuh 1,15 persen. Namun, ada pula provinsi yang mengalami perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun lalu seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau yang masing-masing hanya tumbuh 0,51 persen; 0,44 persen; dan 0,33 persen dibandingkan 2015.

Sungguh pun demikian dalam analisisnya, laporan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak proporsional. Terutama perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dapat mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, 140 juta warga masih hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari, dengan demikian hal ini menyatakan bahwa peningkatan secara kasat mata atau angka-angka belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam tulisan ini penulis membatasi fokus permasalahan pada: 1). Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 2) Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia pada pendidikan dalam meningkatkan daya saing bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis persoalan-persoalan yang muncul, terutama mengenai masalah indeks pembangunan manusia Indonesia berdasarkan dokumen, buku, catatan, majalah dan kisah sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia**

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

Jika sebelumnya opini yang berkembang justru adanya anggapan bahwa pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa kejelasan akan akan manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada kondisi keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran dalam sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap membuang- buang uang yang tidak bermamfaat. Akibatnya alokasi anggaran pendidikan pun biasanya merupakan sisa anggaran.

Cara pandang ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan dan pembangunan suatu bangsa dalam berbagai sektor.

Konsep pendidikan sebagai investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor- sektor yang lainnya. Pemikiran ilmiah ini baru, pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul "*Investment in Human Capital*" dihadapan *The American Economic Association* merupakan peletak dasar teori *human capital* modern. Pesan utama dari pidato ini sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk investasi.

Schult (1960) kemudian memerhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Berbicara mengenai Indeks Pembangunan dari sektor pendidikan diukur berdasarkan konsep penghitungannya didasarkan pada dua komponen yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Berdasarkan data BPS dari tahun 2010- 2016 memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0.56 point atau meningkat sebesar 0.84% dibandingkan tahun sebelumnya 2010, sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 0.61 atau meningkat sebesar 0.91% point jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 indek pembangunan manusia juga mengalami peningkatan sebesar 0.61 point atau meningkat sebesar 0.90%. Sementara itu pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0.59 point atau meningkat sebesar 0.86%, pada tahun 2015 peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0.65 atau meningkat sebesar 0.94% dan pada tahun 2016 peningkatan indeks pembangunan terjadi sebesar 0.63 point atau meningkat sebesar 0.91%. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan peningkatan sebesar 0.65 point, dan secara umum indeks pembangunan manusia di Indonesia berada pada kategori sedang.

Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan IPM masing- masing Propinsi di Indonesia maka IPM berada pada kategori tinggi, sedang dan rendah. IPM tertinggi masih ditempati oleh DKI Jakarta berada pada kategori tinggi sementara itu IPM terendah ditempati oleh Daerah Khusus Papua yang berada pada kategori rendah. Sementara peningkatan IPM yang tinggi ditempati oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan peningkatan sebesar 0.88 poin sedangkan peningkatan terendah ditempati oleh Propinsi Kalimantan Utara dengan peningkatan hanya sebesar 0.12 point. Secara umum peningkatan IPM di berbagai Propinsi di Indonesia dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Masing- Masing Propinsi di Indonesia tahun 2010-2016

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70
SUMATERA UTARA	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
SUMATERA BARAT	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
RIAU	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20
JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
SUMATERA SELATAN	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
BENGKULU	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33
LAMPUNG	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
KEP. BANGKA BELITUNG	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
KEP. RIAU	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
BALI	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
NUSA TENGGARA BARAT	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
NUSA TENGGARA TIMUR	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13
KALIMANTAN BARAT	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59	65.88
KALIMANTAN TENGAH	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
KALIMANTAN SELATAN	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
KALIMANTAN TIMUR	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.20
SULAWESI UTARA	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
SULAWESI TENGAH	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47
SULAWESI SELATAN	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
SULAWESI TENGGARA	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31
GORONTALO	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86	66.29
SULAWESI BARAT	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60
MALUKU	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60
MALUKU UTARA	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
PAPUA BARAT	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21
PAPUA	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Pengukuran IPM dari indikator pendidikan dapat diukur melalui tiga komponen yakni angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf.

#### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Berdasarkan hasil susenas BPS dari tahun 2010-2015 tercatat bahwa partisipasi penduduk usia 7-12 tahun baik untuk masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan sudah berada pada kondisi yang sangat baik hampir mencapai 100% walaupun tidak seluruh penduduk yang berusia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar kurang dari 1% penduduk yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah. Demikian juga dengan penduduk yang berusia 13-15 tahun partisipasi dalam pendidikan baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan terus mengalami peningkatan walaupun hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi penduduk

yang berusia 13-15 tahun masih dibawah angka 95%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar >5% penduduk yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah atau putus sekolah. Sedangkan untuk kategori penduduk yang berusia 16-18 tahun angka partisipasi sekolah sangat memprihatinkan baik untuk penduduk yang berada diperkotaan maupun yang berada dipedesaan.

Hasil survey menyebutkan bahwa penduduk yang berusia 16-18 tahun banyak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka atau putus sekolah, walaupun kecenderungan dari tahun 2010-2015 angka partisipasi sekolah penduduk yang berusia 16-18 tahun terus mengalami peningkatan. Akan tetapi persentase partisipasi penduduk yang berusia 16-18 tahun masih dibawah angka 75%. Tingginya angka putus sekolah penduduk yang berusia 16-18 tahun disinyalir karena faktor ekonomi data UNICEF tahun 2016 (CNN ) sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama. Demikian juga dengan laporan BPS juga menyebutkan bahwa ditingkat Kabupaten atau Kota di masing- masing Propinsi di Indonesia menunjukkan terdapat kelompok usia anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010-2015**

Daerah Tinggal	Umur	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perkotaan	7-12	98,70	98,40	98,74	98,98	99,31	99,00
	13-15	90,08	90,84	92,25	93,15	96,37	95,92
	16-18	62,69	63,63	66,46	68,94	74,68	75,70
Pedesaan	7-12	97,32	96,67	97,12	97,76	98,40	98,17
	13-15	82,62	84,58	87,08	88,34	92,48	92,72
	16-18	48,50	50,94	54,87	58,07	65,29	64,58
Perkotaan+Pedesaan	7-12	97,97	97,49	97,88	98,34	98,83	98,57
	13-15	86,11	87,58	89,52	90,62	94,32	94,25
	16-18	55,83	57,57	60,87	63,64	70,13	70,26

Sumber: BPS RI- Susenas 2010-2015

#### b. Tingkat Pendidikan Teringgi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat jalannya pembangunan, dengan demikian pendidikan yang tinggi sangat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yaitu merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sering juga disebut dengan rata-rata lama bersekolah. Rata-rata lama bersekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usi 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

#### c. Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tingi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Karena kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki dapat mendorong penduduk untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Angka melek huruf adalah peresentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

**Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf tahun 2011-2015**

Golongan Umur	Perkotaan					Pedesaan				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	99,55	99,75	99,91	99,97	100,00	98,27	98,82	99,21	99,40	99,78
20-24	99,45	99,60	99,88	99,97	99,90	97,72	97,97	98,87	99,29	98,90
25-29	99,54	99,57	99,61	99,80	99,81	97,25	97,78	97,57	98,09	98,53
30-34	99,33	99,38	99,51	99,64	99,72	96,80	96,78	97,04	97,61	97,96
35-39	98,86	99,00	99,21	99,63	99,65	95,23	95,61	96,35	96,51	97,96
40-44	97,40	97,82	98,38	98,98	98,79	91,33	92,44	94,18	95,44	95,39
45-49	94,97	96,42	96,71	97,50	98,37	86,52	89,58	90,34	91,37	93,77
50+	85,35	86,24	88,11	93,02	90,72	72,36	72,68	75,85	84,23	80,13
Jumlah/ Total	95,68	96,10	96,63	97,97	97,43	89,89	89,99	91,12	93,69	92,91
15-24	99,50	99,68	99,89	99,97	99,95	98,00	98,41	99,04	99,35	99,36
15-44	99,08	99,23	99,45	99,69	99,67	96,27	96,65	97,24	97,74	98,06
15+	95,68	96,10	96,63	97,97	97,43	89,89	89,99	91,12	93,69	92,91
45+	88,01	89,08	90,47	94,26	92,82	76,33	77,07	79,54	86,06	83,57

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwasanya angka melek huruf terendah berada didaerah pedesaan dimana terdapat hampir 30% penduduk yang berusia diatas 50 tahun buta aksara dan kondisi ini terus berlanjut dari tahun 2011-2013. Namun jika ditinjau secara keseluruhan baik untuk penduduk yang berada diperkotaan atau pedesaan angka melek huruf penduduk dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan angka melek huruf tertinggi untuk daerah perkotaan terjadi pada tahun 2014 dengan peningkatan sebesar 1,39%, sementara itu pada tahun 2015 terjadi penurunan angka melek huruf sebesar 0,56%. Sementara didaerah pedesaan peningkatan angka melek huruf terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 2,82%. Berdasarkan temuan BPS jika ditinjau dari Propinsi yang ada di Indonesia Papua masih menjadi Propinsi yang angka buta aksara tertinggi yakni dengan persentase 28,61% sedangkan angka buta aksara terendah berada pada Propinsi Sulawesi Utara dengan persentase sebesar 0,45%.

## 2. Langkah yang Ditempuh Pemerintah Indonesia pada Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Ada beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa menuju 2025 sebagai berikut:

### a. Revitalisasi Program Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar kedepan adalah mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan. Jika belajar dari negara yang maju pendidikannya keadilan dalam pelayanan pendidikan hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan pendidikan dasar yang bebas biaya. Dan dalam hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi disekolah masih ditemukan pungutan biaya yang sangat memberatkan siswa. Sehingga kecenderungan yang terjadi pendidikan hanyalah isapan jempol semata. Pendidikan dasar sebagai komponen program *education for all* perlu ditata ulangbaik yang berkaitan dengan bentuk kebijakan dan jenis program maupun kriteria keberhasilannya. Pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan berupa pengadaan sarana belajar, pengadaan buku teks pelajaran serta pengadaan fasilitas fisik lainnya perlu dikaji ulang karena menurut PP no 38/ 2007 sebagian program tersebut adalah urusan Kabupaten/ Kota. Dalam kaitan itu pemerintah pusat seyogianya bertugas sebagai pengembang kapasitas, pengatur subsidi, pemberi insentif terhadap keberhasilan satuan pendidikan serta pengendalian mutu pendidikan.

**b. Program Pendidikan Menengah Universal**

Indonesia perlu ambil bagian dalam gerakan internasional yang dipelopori Bank Dunia yang disebut pendidikan menengah yang universal. Sampai saat ini program wajib belajar yang bebas biaya hanya terbatas pada pendidikan dasar 9 tahun (PP no 47/2009) dan oleh karena itu wajib belajar 12 tahun belum diatur dalam legislasi nasional. Namun pemerintah masih dapat melanjutkan program pendidikan menengah universal untuk memastikan bahwa semua lulusan SMP atau sederajat memperoleh akses ke pendidikan menengah yang unggul dan bermutu serta dapat menyiapkan lulusan untuk bekerja, berusaha mandiri atau melanjutkan pendidikan.

**c. Revitalisasi Pendidikan Vokasi atau Kejuruan**

Dalam kaitan dengan pendidikan kejuruan, lapangan kerja Indonesia kedepan semakin banyak membutuhkan tenaga kerja yang profesional terstandar dan bersertifikat. Dalam hal ini hendaknya lulusan yang berasal dari sekolah kejuruan memang benar-benar lulusan yang mampu bersaing dan unggul dalam dunia kerja.

**d. Membangun Pendidikan Tinggi yang Berkelas Dunia**

Di Indonesia perguruan tinggi (khususnya PTN) dikelola dalam lingkungan birokrasi pemerintahan dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap anggaran pemerintah. Dengan kata lain peningkatan daya saing PT dilakukan dengan menggunakan strategi, prosedur dan akuntabilitas yang umum berlaku dalam dunia birokrasi pemerintahan. Ini berbeda dengan strategi yang berlaku pada negara maju, dimana PT dikelola secara profesional didalam manajemen perguruan yang otonom dengan sedikit mungkin intervensi dari birokrasi pemerintah. PT dikelola secara korporasi yang dirancang agar dapat mengejar mutu dan keunggulan melalui atau didalam suatu persaingan sehat antar perguruan tinggi baik didalam maupun luar negeri.

**e. Pengelolaan Guru dalam Era Otonomi Pendidikan**

Guru yang bermutu adalah prasyarat mutlak untuk membangun pendidikan yang unggul dan bermutu. Betapapun baiknya kurikulum lengkapnya sarana prasarana dan sumber daya yang modern tetapi jika sekolah itu tidak memiliki guru yang profesional tidak ada jaminan siswanya akan berprestasi. Lebih dari itu sebaik apapun kurikulum dalam bentuk dokumen tertulis proses pembelajaran tidak akan efektif jika kinerja guru juga tidak dijamin profesional. Sebaliknya guru yang profesional akan melahirkan program pembelajaran yang mampu memotivasi siswa untuk belajar dan membuahkan dampak yang luar biasa bagi prestasi belajar mereka. Guru yang profesional memiliki semangat dan motivasi berprestasi dan selalu mengasah kecakapannya agar dapat membelajarkan siswa secara optimal.

**f. Sertifikasi Profesi Pendidik**

Program sertifikasi profesi pendidik hendaknya mampu meningkatkan kompetensi dari seorang guru. Sebagaimana dengan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Guru dan Dosen no 14 Tahun 2005 bahwa guru yang profesional diharapkan mampu mengembangkan kompetensi secara terus- menerus melalui pengembangan profesi berkelanjutan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah sekolah maupun belajar mandiri. Sebuah studi (Budimansyah dan Suryadi, 2010) menemukan beberapa kesimpulan yang menarik dari dampak sertifikasi terhadap kualitas belajar antara lain: 1). Sertifikasi tidak menjamin bahwa guru- guru akan menjadi lebih berkualitas dalam mengajar, 2). Sertifikasi cenderung tidak ditentukan oleh kompetensi yang memenuhi standar, 3). Sertifikasi profesi pendidik bagi guru belum memberikan efek yang cukup terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Dari temuan tersebut tentunya diperlukan sebuah kebijakan yang benar- benar mampu menciptakan guru / pendidik yang sudah tersertifikasi adalah pendidik yang benar- benar profesional, misalnya saja untuk saat sekarang syarat bagi yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru- guru yang benar

dianggap mampu memenuhi syarat nilai UK yang sudah ditetapkan, sehingga sertifikasi tidak lagi didasarkan pada prinsip senioritas.

**g. Arah Pembinaan Sekolah Unggul di Masa Depan**

Dihapuskannya RSBI dalam UUSPN no 20/2003 tidak seharusnya menyurutkan upaya bangsa untuk mengembangkan sekolah- sekolah yang bermutu dan unggul. Untuk menjadi sekolah unggul sekolah dapat mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh institusi profesional yang terpercaya. Sekolah- sekolah bermutu yang telah diminati oleh masyarakat memperoleh peluang yang paling tinggi terpilih sbagai sekolah unggulan. Sebagai alternatif kebijakan SBI/RSBI Kemendibud perlu mengembangkan pendidikan globalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan global bertujuan untuk membentuk anak- anak Indonesia agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter berwawasan global.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indek Pembangunan Manusia Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana IPM Indonesia berada pada kategori sedang. Pengukuran IPM yang didasarkan variabel pendidikan memberikan gambaran bahwa angka partisipasi penduduk Indonesia juga mengalami peningkatan walaupun pada kategori penduduk usia 16-18 masih banyak ditemukan penduduk yang petus sekolah baik penduduk yang berada didesa maupun penduduk yang berada diperkotaan. Dan sudah seharusnya terjadinya peningkatan IPM yang didasarkan pada sektor pendidikan juga dapat berpengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia, sehingga investasi di bidang pendidikan dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa. Oleh karena itu agar terjadinya peningkatan daya saing bangsa melalui investasi di bidang pendidikan sangat diperlukan semacam kebijakan yang pada akhirnya mampu menghasilkan sumber daya yang berdaya saiang antara lain: 1). Revitalisasi program pendidikan dasar, 2). Program pendidikanmenengah universal, 3). Revitalisasi pendidikan kejuruan, 4). Membangun pendidikan tinggi berkelas dunia, 5). Pengelolaan guru dalam era otonomi pendidikan, 6). Sertifikasi pendidik, 7). Arah pembinaan sekolah unggul dimasa depan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- <https://www.bps.go.id>. BPS RI- Susenas 2010-2015. *Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf tahun 2011-2015*
- <https://www.bps.go.id>. BPS RI- Susenas 2010-2015. *Angka Partisipasi Sekaolah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010-2015*
- <https://www.bps.go.id>. BPS RI- Susenas 2010-2016. *Indeks Pembangunan Manusia Masing-Masing Propinsi di Indonesia tahun 2010-2016*
- DS Mirza. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Semarang: Jurnal Unnes
- Michael P Todaro.2013. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga